

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET BURHANUDDIN HARAHAP 1955-1956

Yuli Ernawati¹, Dr. Aman, M.Pd²
¹ernawatiyuli12@gmail.com

ABSTRAK

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan Kabinet kelima pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan; 1) Mengetahui proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap; 2) Mengetahui program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap dan pelaksanaannya; 3) Mengetahui kondisi sosial politik Indonesia masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan 4) Mengetahui akhir pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Peneliti menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan. Pertama, penentuan topic. Kedua pengumpulan sumber (*heuristic*) baik sumber primer maupun sekunder. Ketiga, verifikasi yaitu kritik ekstern maupun intern terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Keempat interpretasi, (penafsiran) fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Kelima Historiografi atau penulisan sejarah secara kronologis. Hasil penelitian ini berisi tentang kondisi sosial politik Indonesia masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, diantaranya; 1) Kabinet Burhanuddin terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang tersandung peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Kabinet Burhanuddin merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai; 2) Program kerja pemerintahan Kabinet Burhanuddin berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik dan ekonomi negara yang saat itu masih labil; 3) Burhanuddin Harahap berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, mengatasi korupsi, mengadakan perbaikan ekonomi, serta berhasil menyelenggarakan pemilu. Keberhasilan program kabinet Burhanuddin masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hubungan Indonesia Belanda, telah menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Masyumi serta partai-partai Islam lainnya; 4) Akhirnya Kabinet demisioner setelah gagal menyelesaikan pembatalan perjanjian KMB dan hasil pemungutan suara itu diumumkan.

Kata Kunci : Kondisi Sosial Politik, Kabinet Burhanuddin Harahap, 1955-1956.

SOCIO-POLITICAL CONDITIONS IN INDONESIA IN THE ERA OF THE ADMINISTRATION OF BURHANUDDIN HARAHAP CABINET IN 1955-1956

Yuli Ernawati¹, Dr. Aman, M.Pd²
¹ernawatiyuli12@gmail.com

ABSTRAK

Burhanuddin Harahap Cabinet was the fifth cabinet in the era of the parliamentary democracy in Indonesia. This study aims to investigate: 1) the process of the formation of Burhanuddin Harahap Cabinet, 2) the work program of Burhanuddin Harahap Cabinet and its implementation, 3) socio-political conditions in Indonesia in the era of Burhanuddin Harahap Cabinet, and 4) the end of the administration of Burhanuddin Harahap Cabinet. The researcher employed the historical research methodology consisting of five stages. The first was topic selection. The second was source collection (*heuristics*) including primary and secondary sources. The third was verification, namely external and internal criticisms to the obtained sources. The fourth was interpretation of the obtained historical facts. The fifth was historiography or chronological history writing. The results of the study were about the socio-political conditions in Indonesia in the era of the administration of Burhanuddin Harahap Cabinet. 1) Burhanuddin Cabinet was formed after the downfall of Ali Sastroamidjoyo Cabinet I that was stumbled by the Army incidence of 27 June 1955. Burhanuddin Cabinet was a coalition cabinet consisting of several parties. 2) The work program of the administration of Burhanuddin Cabinet tried to stabilize the state's social, political, and economic conditions that were unstable then. 3) Burhanuddin Harahap succeeded in bringing the government's authority back in the eyes of Army and society, dealing with corruption, making economic improvement, and holding a general election. The success of the programs of Burhanuddin Cabinet was still far from the expectation. The relationship between Indonesia and the Netherlands caused friction in the Masyumi party and other Islamic parties. 4) Finally, the cabinet became an outgoing cabinet after it failed to deal with the cancellation of the agreement in KMB (Round Table Conference) and the results of the general election were announced.

Keywords: *Socio-political Conditions, Burhanuddin Harahap Cabinet, 1955-1956.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, sudah melaksanakan tiga tipe demokrasi. Tiga tipe demokrasi tersebut adalah Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Indonesia setelah kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia memakai Sistem *Demokrasi Parlementer*.¹ Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 adalah sistem kabinet Parlementer, maksudnya setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan sebagian besar dari parlemen (DPR pusat).² Kedudukan kabinet tergantung dari dukungan dalam parlemen. Dalam sistem kabinet parlementer, kedudukan Presiden sebagai kepala negara tidak bertanggungjawab atas pemerintahan. Presiden hanya sebagai simbol yaitu mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Presiden berwenang membentuk *formatur kabinet*³, apabila terjadi krisis kabinet dalam pemerintahan.

Tahun 1950 sampai tahun 1959, terdapat sejumlah kabinet yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam setiap tahunnya selalu berganti kabinet. Kabinet-kabinet itu diantaranya adalah Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953-Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjoyo II (1956-1957) dan kabinet Djuanda (1957-1959).⁴

Setelah jatuhnya Kabinet Ali I, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatur kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden Nomor 141 tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.⁵

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, hampir merupakan Kabinet Nasional sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Kabinet ini termasuk kabinet koalisi, hal ini dikarenakan masih ada beberapa partai oposisi yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya.

Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, adalah 1)Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, 2)Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru, 3)Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, 4)Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, 5)Memberantas korupsi, 6)Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan 7)Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.⁶ Seperti halnya pelaksanaan program

¹*Demokrasi Parlementer* adalah sistem politik yang ditandai oleh banyak partai yang kekuasaan politik berada ditangan politikus sipil yang berpusat di Parlemen, (B. N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003, hlm. 116).

² Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius.1992, hlm. 77.

³*Formatur Kabinet* adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Kepala Negara untuk membentuk kabinet. (B. N. Marbun, *op.cit.*, hlm. 171).

⁴ Zulkarnain. *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*.Yogyakarta: Pujangga Press. 2012, hlm. 104.

⁵*Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Boerhanuddin Harahap*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI. 1955, hlm. 3.

⁶P.N.H.Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djembatan. 2003, hlm. 152-153.

kerja kabinet lainnya, kabinet Burhanuddin juga mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program kerjanya.

Keberhasilan kabinet Burhanuddin Harahap adalah 1) menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante), 2) Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, 3) berhasil mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan mengendalikan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi.⁷ 4) berhasil memberantas korupsi dengan mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigainya, seperti Djody Gondokusumo bekas Menteri Kehakiman masa Kabinet Ali.

Semasa pemerintahannya, Burhanuddin Harahap berusaha menstabilkan kondisi sosial politik Indonesia pada saat itu. Meskipun demikian dalam perjalanannya kabinet ini juga mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan kabinet ini demissioner. Atas dasar uraian diatas penulis berusaha mengkaji lebih dalam mengenai "Kondisi Sosial Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhannudin Harahap (1955-1956)". Pembahasan ini menarik untuk diteliti mengingat kabinet ini tidak berumur panjang hanya sekitar kurang lebih 7 bulan saja, tetapi masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan perbaikan ekonomi dan dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, dan berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat. Penulis tertarik untuk mengetahui secara rinci keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

B. METODE PENELITIAN

Helius Sjamsuddin menerangkan bahwa metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.⁸ Peneliti menggunakan metode sejarah kritis. Metode ini menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Langkah pertama dalam melaksanakan penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Kemampuan menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian sejarah biasa dikenal sebagai tahap heuristik.⁹

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu.¹⁰ Kritik Sumber dilakukan secara ekstern maupun intern.

4. Interpretasi (Analisis Sumber)

Untuk melaksanakan interpretasi sejarah ini juga dibutuhkan suatu analisis dari peneliti setelah dilaksanakan verifikasi sumber untuk meminimalisir terjadinya subyektifitas peneliti.

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Penulisan sejarah merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah. Dalam tahap ini peneliti berperan untuk menyusun sumber-sumber yang telah

⁷Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985, hlm. 168.

⁸Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012, hlm. 11.

⁹Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 147.

¹⁰ Helius Sjamsuddin. *op.cit.*, hlm. 104.

didapat dengan kronologis agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam peristiwa sejarah.

C. PEMBAHASAN

1. Terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1917 di Medan, Sumatera Utara.¹¹Burhanuddin Harahap merupakan anak dari Muhammad Yunus dan Siti Nurfiah. Burhanuddin memulai pendidikannya di HIS (*Hollands Inlandse School*)Tanjung Balai, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Tahun 1935 Burhanuddin melanjutkan pendidikannya ke AMS A-2 (*Algemene Middelbare School*) di Yogyakarta. Tahun 1938 Burhanuddin melanjutkan ke RHS (*Rechts Hoge School*)di Jakarta. Terakhir Burhanuddin mengenyam pendidikan di UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta. Selama bersekolah, Burhanuddin aktif dalam beberapa organisasi pemuda seperti SIS, JIB, dan PPPI. Karir Burhanuddin juga nampak dalam bidang peradilan di mulai pada pengadilan Negeri Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang (1942-1946). Selain itu Burhanuddin juga aktif dalam beberapa organisasi politik yaitu GPII (*Gerakan Pemuda Islam Indonesia*) dan Partai Masyumi. Pada waktu Indonesia menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), Burhanuddin duduk dalam Parlemen. Demikian pula setelah Indonesia menjadi negara kesatuan, Burhanuddin menjadi anggota DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara). Posisinya di Parlemen ini terhenti sebentar karena ia harus mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan pada demokrasi liberal, menggantikan kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang telah berakhir.

Terpilihnya Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri tidak lepas dari jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang dikarenakan Peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Setelah kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandatnya, Indonesia menjadi demisioner¹². Setelah mengalami krisis kabinet selama tujuh belas hari, Wakil Presiden mengadakan hearing dengan pimpinan-pimpinan partai politik selama 3 hari. Akhirnya tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk 3 orang formatur (pembentuk)yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (Non Partai).¹³Namun, ketiga formatur itu gagal membentuk kabinet sehingga Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 11 Agustus 1955 Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa ikutnya PNI. Keesokan harinya tanggal 12 Agustus 1955, kabinet baru ini dilantik oleh Wakil Presiden Moh. Hatta di Istana Negara, selanjutnya diadakan timbang terima dengan kabinet Ali demisioner bertempat di gedung Dewan Menteri Pejambon.¹⁴Kabinet Burhanuddin harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai.

2. Program Kerja dan Pelaksanaannya

Program kerja kabient Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh pokok. Banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, namun akhirnya semua program kerja dapat terlaksana. Untuk mengetahui apa saja program kerja kabinet dan bagaimana pelaksanaannya berikut akan dipaparkan kinerja selama periode pemerintahannya.

¹¹ Suswanta. *op.cit.*, hlm. 22.

¹² Demisioner adalah keadaan suatu kabinet yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara. Kabinet ini tetap melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet baru. (B.N. Marbun. *op.cit.*, hlm. 114).

¹³Merdeka, 1 Agustus 1955, hlm. 1.

¹⁴*Ibid*, 12 Agustus 1955, hlm. 1.

1. Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.

Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah merupakan program utama yang diusung oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Mengingat dalam periode 1950-1955 ini sering jatuh bangunnya kabinet. Akibatnya terjadilah krisis kabinet, krisis pemerintahan, krisis ekonomi, korupsi, krisis kepercayaan dan krisis kewibawaan. Kehilangan kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya terlihat nyata dikalangan Angkatan Darat yang akhirnya turut menyebabkan keruntuhan kabinet-kabinet yang lalu. Pada masa Kabinet Wilopo terjadi "Peristiwa 17 Oktober 1952" yang berujung pemecatan A.H Nasution sebagai KSAD dan perpecahan dalam Angkatan Darat serta Parlemen.¹⁵ A.H.Nasution lengser, kedudukannya digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 4 November 1953. Sehubungan dengan perpecahan tersebut, Akhirnya tanggal 17 Februari 1955 berhasil diadakan suatu pertemuan para pimpinan perwira AD (Angkatan Darat) yang menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat atau Piagam Yogyakarta, tetapi antara Angkatan Darat dan Pemerintah tetap tidak tercapai kesepakatan mengenai peristiwa tersebut. Hal ini yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah memutuskan mengangkat Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD. Namun pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo ini juga mengalami pertentangan dari para pemimpin TNI. Pada saat pelantikan, Kolonel Zulkifli Lubis sebagai pejabat KSAD menolak untuk melaksanakan serah terima. Peristiwa ini menunjukkan bahwa antara pemerintahan dan pihak militer telah terjadi perpecahan dan berakibat pada jatuhnya kewibawaan pemerintahan. Menghadapi masalah tersebut Kabinet Burhanuddin Harahap mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan 17 Oktober 1952 dengan memutuskan tidak akan diadakan penuntutan-penuntutan di muka pengadilan sedangkan tindakan-tindakan selanjutnya disesuaikan dengan jiwa Piagam Yogya. Pemerintah juga mengambil kebijaksanaan untuk menempatkan kembali dalam jabatan aktif semua perwira yang telah dibebastugaskan dari tugasnya karena tersangkut peristiwa 17 Oktober. Bahkan pada tanggal 28 Oktober 1955 Kabinet memutuskan untuk mengangkat Kolonel A.H Nasution sebagai KSAD dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 7 November 1955. Pada masa ini, telah terjalin hubungan yang baik antara Angkatan Darat dengan Pemerintah.

2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyergerakan terbentuknya Parlemen yang baru.

Pemilu yang telah menjadi rencana agenda dari tiap kabinet akhirnya dapat terlaksana pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap. pemilu untuk anggota DPR tanggal 29 September 1955 dan pemilu untuk anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955. UU No. 7 th 1953 menjadi landasan hukum pemilu 1955. Meski dalam persiapan pelaksanaannya terdapat beberapa kendala terutama mengenai penyebaran barang-barang pemilu ke pelosok daerah-daerah di Indonesia pada saat itu, namun akhirnya pemilu yang telah diimpi-impikan dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1955 guna melancarkan penyelenggaraan pemilu. ¹⁶Hasil pemilu yaitu lahirnya 4 partai besar yang menduduki kursi pemerintahan tertinggi, yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 Kursi), NU

¹⁵ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002, hlm. 73.

¹⁶ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah. op.cit.*, hlm. 7.

(45 Kursi) dan PKI (39 Kursi). Yang sangat melonjak kenaikan jumlah kursinya di parlemen yaitu NU dari 8 menjadi 45 dan PKI dari 17 menjadi 39 kursi.¹⁷

3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.

Peraaturan mengenai desentralisasi Indonesia sebelumnya masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh pihak Belanda. Pemerintah menyatakan bahwa I.G.O. (*Inlandsche Gemeente Ordonantie*) dan I.G.O.B (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) harus diganti dengan Undang-Undang Pokok baru yang dapat membawa haluan baru bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat desa dengan mempergunakan syarat-syarat modern. Burhanuddin Harahap telah mengajukan rancangan undang-undang sementara kepada parlemen. Dalam rancangan tersebut nampak pula hubungannya antara Desapraja-desapraja itu dengan daerah-daerah otonom dari Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah. Namun dikarenakan kurangnya persyaratan-persyaratan untuk membuat undang-undang baru akhirnya Pemerintah tetap menggunakan IGO dan IGOB sampai peraturan perundang-undangan yang baru dapat diselesaikan.

4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi

Indonesia dihadapkan pada masalah inflasi yang disebabkan oleh dua hal, yang pertama Jumlah peredaran uang yang melampaui batas disebabkan oleh defisit pada anggaran belanja Pemerintah. Sehingga tekanan inflasi sangat melemahkan kedudukan devisen¹⁸ negara. Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa tindakan yakni menyelidiki dan mengawasi anggaran pengeluaran belanja serta menyiapkan rancangan anggaran belanja. Permasalah kedua yaitu ekonomi moneter yang disebabkan tidak meratanya penyebaran barang, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kredit pada importir nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai mampu menstabilkan perekonomian negara pada saat itu.

5. Memberantas korupsi.

Korupsi yang merajalela sejak pemerintahan Kabinet Ali telah meninggalkan kerugian yang besar terhadap negara. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, pemerintah mengajukan Undang-Undang antikorupsi itu sebagai Undang-Undang darurat agar melancarkan prosedur pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak-tindak pidana korupsi. Namun NU dan Perti merasa keberatan dan akan menarik menteri-menterinya dari Kabinet jika Kabinet tetap nekat mempercepat usaha pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan Undang-Undang darurat.¹⁹ Kabinet akhirnya tidak jadi mengeluarkan Undang-Undang darurat itu.

6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Masalah perjuangan Irian Barat bukan masalah yang singkat bagi sejarah Indonesia. Setiap kabinet memiliki cita-cita untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Sama halnya dengan itu, kabinet Burhanuddin Harahap juga memiliki cita-cita yang sama. Kabinet melakukan perundingan dengan pihak Belanda namun rencana perundingan ini tidak mendapat restu dari Presiden dan beberapa partai dalam parlemen. Meskipun demikian kabinet tetap melakukan rencana perundingan tersebut. Hal ini membuat keadaan politik semakin memanas. Banyak partai yang menarik menteri-menterinya dari

¹⁷ Wilopo. *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu. 1976, hlm. 44.

¹⁸ Devisen merupakan instrumen untuk pembayaran antar negara, terutama dalam bentuk cek, draft, debit dan kredit.

¹⁹ Deliar Noer. *Partai Islam di tengah Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press. 1987, hlm. 303.

kabinet. Pertikaian antar partai dalam tubuh kabinet inilah yang mendorong Kabinet Burhanuddin Harahap untuk segera mengembalikan mandatnya kepada pemerintah.

7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, kabinet Burhanuddin Harahap melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara tetangga maupun negara jauh. Hal ini sebagai tindakan lanjutan dari kerjasama anatara negara-negara asia –afrika yang sebelumnya telah disepakati pada masa kabinet Ali I.

3. Kondisi Sosial Politik

Pada masa demokrasi liberal sampai berakhirnya UUDS 1950, terhitung terdapat 7 kabinet yang memerintah. Kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanudin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda.²⁰ Persaingan antar partai, gonta ganti kabinet dan program-program kerja yang terbengkalai membuat kondisi sosial politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Hal itu dikarenakan adanya intervensi kepentingan partai dalam tubuh kabinet sehingga setiap program kerja atau kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan partai bukan kepentingan negara. Keadaan politik yang tidak stabil membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pula pada saat itu.

Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet ini berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik dan ekonomi melalui kebijakan-kebijakannya. Sebagai hasilnya, kabinet Burhanuddin dapat dikatakan cukup berhasil. Keberhasilan-keberhasilan itu diantaranya seperti berhasil mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, mengatasi korupsi, mengadakan perbaikan ekonomi, serta melaksanakan pemilu. Namun sangat disayangkan dalam hubungan Indonesia Belanda, telah terjadi perpecahan di dalam tubuh Masyumi serta partai-partai Islam lainnya. Kondisi semakin tidak kondusif ketika partai-partai seperti NU dan PSII menarik menteri-menterinya dari kabinet.²¹ Selain itu juga terjadi pemboikotan terhadap rencana perundingan yang akan dilakukan perdana menteri. Keadaan politik yang semakin memanas inilah yang akhirnya mendorong Kabinet Burhanuddin Harahap untuk segera mengembalikan mandatnya pada presiden.

4. Berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap telah berhasil melaksanakan sebagian program kerjanya meskipun tidak maksimal. Dalam perkembangannya Kabinet ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang umum terjadi pada kabinet-kabinet sebelumnya, yakni keretakan dalam tubuh kabinet itu sendiri. Perpecahan antar partai disebabkan adanya pertentangan anatara satu partai dengan partai lainnya menyangkut kebijakan yang dilakukan perdana menteri Burhanuddin Harahap. Dalam hal ini kebijakan mengenai pembebasan Irian Barat telah membawa perpecahan dalam pemerintahan termasuk antara Presiden dengan Perdana Menteri. Selain itu keretakan dalam tubuh partai juga terjadi, dalam tubuh Masyumi sendiri perpecahan itu ditandai dengan Kelompok Sukiman dan Kelompok Natsir yang kembali memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis. Masalah lain yang dihadapi kabinet Burhanuddin adalah Angkatan Udara. Kabinet bermaksud mengangkat Komodor H. Sujono menjadi Wakil KSAU mewakili Suryadarma. Namun Suryadarma tidak menyetujui hal itu. Ia bersama pendukungnya memboikot pelantikan Sujono pada tanggal 14 Desember 1955 sehingga pengangkatannya batal.²² Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner.

²⁰ Zulkarnaen. *loc. cit.*

²¹ Merdeka, 19 Januari 1956, hlm. 1.

²² A.B. Lopian. *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996, hlm. 242.

Setelah Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden tanggal 3 Maret 1956, Kabinet ini dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru.

Pada tanggal 9 Maret 1956, dengan didampingi oleh Mr. Wilopo (PNI), formatur Ali Sastroamidjoyo mulai mengadakan *hearing* dengan wakil-wakil partai.²³ Dalam *hearing* ini, formatur hanya mengadakan perundingan dengan partai yang sedikit-sedikitnya mempunyai 4 kursi di Parlemen. Formatur tidak menemui kesulitan-kesulitan yang prinsipil mengenai program Kabinet. Sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Kepala Negara kepada formatur, maka pada tanggal 16 Maret 1956 formatur Ali Sastroamidjoyo menyampaikan susunan Kabinet baru kepada Presiden. Tanggal 24 Maret 1956, Kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo pun dilantik oleh Presiden Soekarno yang berdasarkan Kepres RI No. 85 Tahun 1956.²⁴

Kesimpulan

Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1917 di Medan Sumatera Utara. Burhanuddin Harahap merupakan putra dari pasangan suami istri Muhammad Yunus dan Siti Nurfiyah. Burhanuddin Harahap aktif dalam beberapa organisasi pemuda dan organisasi politik yang membawanya ke kursi Perdana Menteri pada kabinetnya sendiri. Terpilihnya Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri tidak lepas dari jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang dikarenakan Peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Setelah itu Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk 3 orang formatur untuk membentuk Kabinet Baru, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (Non Partai). Namun ketiga formatur ini gagal melaksanakan tugasnya. Akhirnya Wakil Presiden Moh. Hatta melimpahkan tugas tersebut kepada Burhanuddin Harahap dan menunjuknya sebagai formatur yang baru. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini juga sering disebut kabinet koalisi, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa partai yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya.

Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin yaitu: (1) Mengembalikan kewibawaan (*Gezag*) moral pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, (2) Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru, (3) Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, (4) Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, (5) Memberantas korupsi, (6) Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, (7) Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Program kerja yang diajukan Kabinet ini tidak jauh berbeda dari kabinet sebelumnya, meskipun demikian pelaksanaannya mengandung pengertian yang luas. Burhanuddin Harahap diwajibkan mengembalikan kewibawaan atau *gezag* moral Pemerintah i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah serta melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen baru.

Program Kerja yang diajukan Kabinet Burhanuddin Harahap hampir semua terealisasi dengan baik meskipun didalamnya masih ada kekurangan-kekurangan. Kabinet Burhanuddin Harahap telah berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, berhasil mengatasi korupsi, mengadakan perbaikan ekonomi, serta berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Kegagalan ditemui

²³P.N.H. Simanjuntak. *op.cit.*, hlm. 160.

²⁴*Ibid*, hlm. 162.

ketikausahanya gagal untuk mengontrol Angkatan Udara, juga tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagal menyelesaikan permasalahan hubungan Indonesia Belanda yang memang menjadi masalah utama dari kabinet-kabinet sebelumnya.

Pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap terdapat peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia. Kewibawaan Pemerintah yang sempat jatuh karena peristiwa 27 Juni 1955 dan korupsi yang merajalela mendorong pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah dihadapan Angkatan Darat dan masyarakat. Segala upaya dilakukan Burhanuddin Harahap, ia mengangkat kembali A.H Nasution sebagai KSAD dan memberantas korupsi yang merugikan negara serta menimbulkan perekonomian Indonesia carut marut itu. Burhanuddin menindak tegas bahkan menjebloskan mereka yang terbukti bersalah ke dalam tahanan. Pelaksanaan pemilihan umum juga berjalan secara aman, tertib dan demokratis. Masyarakat yang ketika kampanye terpecah belah sesuai dengan garis kepartaian, ketika hari H pergi ke kotak-kotak suara dengan tertib dan disiplin. Sungguh suatu yang tidak terduga. Setelah pemilihan umum diselenggarakan, dan dalam hubungan Indonesia Belanda, kabinet berhasil menempatkan kedudukan Indonesia pada tempat yang lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Beberapa diantara masalah itu menyebabkan kembalinya perpecahan dalam lingkungan Masyumi serta antara partai-partai Islam sehingga permulaan yang sangat menguntungkan bagi mereka jika kabinet yang mulai bekerja ini tidak dapat diteruskan. Kelompok Sukiman dengan kelompok Natsir memperlihatkan kembali hubungan yang tidak harmonis. Pertikaian antara partai Islam, terutama Masyumi dan partai-partai Islam lain bersangkutan pula dengan soal hubungan Indonesia Belanda. Dalam periode ini Presiden Soekarno mulai campur tangan.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956, pada tanggal yang sama dalam sidangnya kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara tanggal 3 Maret 1956. Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekarno, dan Kabinet dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru yaitu kabinet Ali Sastroamidjono II. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [2]Deliar Noer. (1987).*Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta : Grafitry Press .
- [3] Helius Sjamsuddin. (2007) *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [4]Kementerian Penerangan Republik Indonesia.(1955). *Keterangan dan Jawaban Pemerintah atas Program Kabinet Boerhanuddin Haarahap*. Jakarta:Kementerian Penerangan.
- [5] Lopian, A.B dkk. (1996) *Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959*. Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [6] Marbun, B.N. (2003). *Kamus Politik*. Jakarta: pustaka sinar harapan
- [7] Merdeka, 1 Agustus 1955, hlm. 1.
- [8] Merdeka, 12 Agustus 1955, hlm. 1.
- [9] Merdeka, 19 Januari 1956, hlm. 1.
- [10] Moedjanto. (1992). *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius.
- [11]Saefur Rochmat. (2009). *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- [12] Simanjutak, P.N.H. (2003) *Kabinet-Kabinet Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta : Djambatan
- [13] Suwanta. (2000) *Keberanian Untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*. Yogyakarta: Avyrouz.
- [14] Wilopo S. H. (1976) *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta :Yayasan Idayu.
- [15] Yahya A. Muhaimin. (2002) *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [16] Zulkarnain. (2012) *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Pujangga Press.

Penguji Utama



Hj. Harianti, M.Pd
NIP. 19501210 197903 2 001

Yogyakarta, Oktober 2014
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Aman, M.Pd
NIP. 19741015 200312 1 001